



Dominan untuk Belanja Pegawai

Rendah, Penyerapan

APBN di Bali

Denpasar (Bali Post) –

Penyerapan dana pemerintah pusat untuk Bali masih relatif rendah. Ini tercermin dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I/2015 yang hanya terserap Rp 2,56 triliun. Padahal, pemerintah pusat telah menganggarkan Rp 10,33 triliun dari pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Hal itu terungkap dalam kunjungan jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali ke Redaksi *Bali Post*, Senin (21/9) kemarin. Kehadiran Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Kementerian Keuangan RI R. Wiwin Istanti bersama rombongan diterima jajarannya redaksi *Bali Post*.

Dalam lawatannya, Wiwin Istanti mengatakan dana yang diberikan pemerintah pusat untuk Bali diperuntukkan bagi belanja pegawai, barang, modal dan bantuan sosial untuk seluruh satuan kerja kementerian atau lembaga. "Penyerapan APBN untuk Bali pada semester pertama ini baru 24 persen dari target penyerapan yang ditetapkan pemerintah yaitu 40 persen. Kami berharap angka penyerapan itu bisa lebih besar hingga akhir tahun ini," katanya.

Menurutnya, dana yang telah terserap, sebagian besar dipergunakan untuk belanja pegawai seluruh satuan kerja



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 085 100 400 391, (0361) 819446

kementerian/lembaga yang ada di Bali. Selain itu juga dimanfaatkan untuk pengadaan barang dalam rangka kegiatan operasional seluruh satuan kerja tersebut, pembiayaan program-program pembangunan dan sosial kemasyarakatan di daerah serta dana pemerintah pusat untuk bantuan sosial kemasyarakatan. "Belanja pegawai itu terserap 67,60 persen dari pagu Rp 3.796.211.972.000, baru disusul belanja barang, modal dan bantuan sosial," tuturnya.

Dia berharap dana yang tersedia hingga akhir tahun ini dapat terserap lebih banyak. Mengingat, APBN yang telah disiapkan pemerintah pusat harus dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan sosial masyarakat dalam rangka peningkatan



Sambungan - - -



Bali Post/wan

BERKUNJUNG - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Kementerian Keuangan RI R. Wiwin Istanti bersama rombongan, Senin (21/9) kemarin berkunjung ke Bali Post.

kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya Bali. "Kami akan melakukan upaya proaktif dengan melakukan sosialisasi. Untuk satuan kerja

yang potensi penyerapannya rendah, akan dilakukan melalui *Focus Group Discussion*," ujar Wiwin Istanti seraya menambahkan, penyaluran

APBN di Bali dilakukan oleh tiga kantor pembendaharaan negara (KPPN) yang berada di Denpasar, Singaraja, dan Amlapura. (kmb27)

Edisi : Selasa, 22 September 2015

Hal : 2



KPUD Buleleng Ajukan Anggaran Pilkada Rp 46,8 Miliar

Singaraja (Bali Post) -

Pilkada Buleleng dipas-tikan akan digelar Febru-ari 2017 mendatang. Meski pelaksanaannya dua tahun lagi, KPUD Buleleng lebih awal menyusun proposal ang-garan yang akan diperlukan untuk melaksanakan hajatan politik lima tahunan tersebut. Dari proposal anggaran yang sudah disusun itu, KPUD mengajukan anggaran Rp 46,8 miliar.

Ketua KPUD Buleleng Gede Suardana Senin (20/9) kemarin, membenarkan telah mengirim proposal anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Buleleng tahun 2017. Sebe-lum mengajukan proposal, pihaknya sudah melakukan kajian dan hitung-hitungan terhadap nilai anggaran yang akan diperlukan. Dari pemba-iasan tersebut total kebutu-

han anggaran itu mencapai Rp 46,8 miliar. Anggaran sebesar ini dinilai mencu-kupi untuk semua tahapan pilkada. Dari beberapa item kebutuhan anggaran yang memakan dana besar mulai dari honorarium, dana kam-panye, sosialisasi, pengadaan logistik dan sebagainya.

Menurut Suardana, ala-san mengajukan proposal anggaran pilkada ini karena pelaksanaan pilkada di awal tahun 2017 mendatang. Jika pengajuan proposalnya lewat dari tahun 2016, maka dikha-watirkan akan menghambat tahapan pilkada yang sudah memerlukan dukungan ang-garan mulai tahun 2016. Suardana mengatakan sebe-lum mengirimkan proposal pihaknya bersama komisioner KPUD Buleleng telah audi-ensi dengan pimpinan DPRD

Buleleng. Ketua DPRD Bule-leng Gede Supriatna men-gatakan, tahapan pilkada akan dihelat pada awal tahun anggaran 2017, maka peny-usunan proposal anggaran perlu diajukan lebih awal. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi jangan sam-pai persoalan anggaran ini menghambat tahapan pilkada yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Untuk itu, pihaknya menyambut positif kinerja KPUD yang menyusun lebih awal item anggaran. Lembaga dewan dalam waktu dekat ini akan melakukan koordinasi dengan tim anggaran pemerintah untuk membahas anggaran pilkada, sehingga begitu usulan anggarannya masuk da-lam APBD tahun 2016, maka pembahasan akan lebih cepat bisa disahkan. (kmb38)

Edisi : Selasa, 22 September 2015

Hal : 7



Rencana Penjualan Aset Dikaji Ulang

Mangupura (Bali Post) -

Pansus Aset DPRD Bali beberapa waktu lalu mengusulkan agar Pemprov Bali menjual saja aset-aset berupa tanah *idle* berukuran di bawah 5 are. Namun, wacana ini akhirnya akan dikaji ulang lantaran cukup sensitif di masyarakat. Keputusan ini berawal dari usulan anggota Pansus Aset Ketut Tama Tenaya dalam rapat pansus bersama Biro Aset Pemprov Bali, Senin (21/9) kemarin.

"Menurut kami, ini karena belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas tentang bagaimana menjual aset supaya ini tidak menjadi sesuatu yang gamang dan tidak jelas bahkan menjadi keributan atau kegaduhan. Untuk sementara, saya usulkan di Pansus ini, keinginan untuk menjual tersebut kita pending," ujar Tama Tenaya.

Ketua Komisi I DPRD Bali ini menilai tanah-tanah berukuran kecil itu lebih baik dijadikan taman kota, *public space*, atau tempat rekreasi masyarakat. Kemudian untuk aset yang memang dikontrakkan, Tama meminta adanya klasifikasi. Apakah diatur oleh peraturan gubernur atau perda, terkait zona-zona tanah agar ada kejelasan harga. "Jadi, tidak ada kongkalikong di belakang layar. Karena kedekatan, ya...dikasi murah. Ini harus transparan, kita tunjukkan kepada masyarakat. Itu supaya jelas diatur dan bila perlu harus sepegetahuan DPRD Bali. Jangan sampai setelah ada masalah baru pengaduannya ke dewan. Dari awal kita harus tahu ke mana itu, atau siapa yang akan mengontrak aset itu," paparnya.

Politisi PDI-P ini juga menyinggung soal usulan masyarakat agar Pemprov Bali membeli tanah-tanah di sekitar kawasan suci seperti Pura Dang Khayangan dan Sad Khayangan. Tama mengusulkan tukar guling bila pemprov tidak memiliki cukup uang untuk membeli lahan minimal di radius 500 meter. Tukar guling dilakukan dengan aset-aset milik Pemprov Bali.

"Itu untuk menjaga *taksu* pura. Kalau tidak seperti itu, kita tidak jamin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang ketika investor interest dengan tanah tersebut, dia berani beli dan dibangun vila-vila di sekitar itu, meskipun akan melabrak aturan. Seperti kita lihat sekarang, banyak vila berdiri dekat pura karena memang hak milik yang dibeli oleh investor," jelasnya. Oleh karena itu, Tama mengharapkan Pemprov Bali bisa mengantisipasi sejak awal hal ini mumpung masih memiliki banyak aset. Namun, tetap berkoordinasi dengan kabupaten/kota di mana tempat suci itu berada.

Kepala Biro Aset Pemprov Bali Ketut Adiarsa mengatakan, pelepasan aset tanah dengan mekanisme ganti rugi dimungkinkan dalam PP. Namun dengan ketentuan, aset-aset itu tidak sesuai dengan tata ruang dan dari sisi pemanfaatannya memang tidak optimal dimanfaatkan. "Tetapi ini perlu kehati-hatian bahwa ini perlu dikaji kembali, apakah memang itu pilihan. Kalau memang bisa dimanfaatkan yang lain, misalnya bisa disewakan, kita sewakan. Apabila bisa ditukar-menukar, kita tukar-menukar. Jadi, menjual itu pilihan terakhir yang bisa diambil, tetapi dengan beberapa pertimbangan," ujarnya.

Adiarsa mengatakan, penjualan aset melalui mekanisme pelelangan umum atau tender. Hasil penjualan aset-aset *idle* harus dibelikan satu aset di satu hamparan sehingga pemanfaatan lebih optimal. Sementara itu, proses tukar-menukar berkaitan dengan tanah-tanah di sekitar pura harus merujuk pada ketentuan berlaku. "Pura-pura harus dikoordinasikan dengan Dinas Kebudayaan, mana yang menjadi tanggung jawab pemprov, seperti Besakih. Kalau pura di luar kewenangan pemprov, dari regulasi menyulitkan sehingga perlu dicermati kembali," jelasnya. (kmb32)

Edisi : Selasa, 22 September 2015

Hal : 3



Tindak Galian C Ilegal, Pembkab Dinilai Tak Tegass

Amlapura (Bali Post) -

Pembkab Karangasem dinilai tak tegas dalam menyikapi maraknya galian C ilegal. Anggota DPRD Karangasem, I Gede Dana, Senin (21/9) kemarin, menilai ada yang kacau di antara instansi terkait di dalamnya. Semestinya, jika sudah melanggar perda, apalagi jelas-jelas ilegal, tidak ada alasan bagi pihak terkait tidak berani melakukan penertiban.

Ketua Fraksi PDI-P Karangasem ini, meminta eksekutif tidak menjadikan perda yang ada seperti macan ompong. Sebab, aturan dimuat untuk ditegakkan, bukan untuk dilanggar. Ia mengaku sangat menyayangkan kondisi ini. Apalagi, situasi seperti ini di Karangasem sudah terjadi bertahun-tahun, tanpa ada yang berani bergerak menegakkan perda. "Logikanya kan sederhana saja. Kalau sudah ilegal, maka wajib ditertibkan, bukan dibiarkan," ujarnya. Politisi muda asal Desa Datah ini mencurigai ada pihak-pihak tertentu yang membuat instansi yang berwenang, seperti Satpol

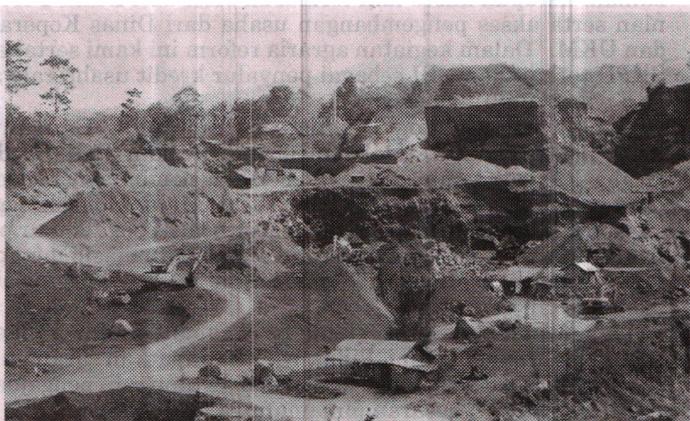
PP, tidak berani melakukan tindakan tegas.

"Satpol PP itu kan ada atasannya. Kalau atasannya bilang jangan (melakukan penertiban), pasti tidak berani bergerak," katanya. Tidak hanya soal penegakan perda, pembkab menurutnya, mesti mampu berpikir jauh ke depan, memikirkan masa depan masyarakat setempat. Kalau misalnya pusat galian C itu ditutup, maka pemerintah daerah harus membuka lapangan kerja baru. Sehingga, tidak menambah jumlah pengangguran di Karangasem. Sejauh ini, ia tidak melihat pembkab melakukan upaya-upaya seperti itu. Sementara, saat ini galian C ilegal tersebut terus beroperasi, meski sudah melebihi batas maksimal kedalaman galian 500 meter.

Menurutnya, jika ini dibiarkan, tentu akan semakin memperburuk kondisi lingkungan sekitarnya. Pihaknya berharap Bupati Karangasem ke depan, bisa memberikan solusi ideal atas persoalan lingkungan yang sudah terjadi berta-

hun-tahun. Tokoh masyarakat Karangasem Nyoman Sadra, belum lama ini menilai aktivitas pertambangan galian C di Karangasem, kini sudah tidak mengindahkan aturan yang ada. Menurutnya, galian C hanya mewariskan kerusakan lingkungan, yang tidak mudah dipulihkan kembali. Ia mendorong, agar Karangasem lebih serius mengembangkan pariwisata, yang sudah digagas dengan konsep pariwisata spiritual. Bukan mengeruk kaki Gunung Agung secara terus-menerus.

"Kalau Karangasem mau maju (pariwisata), sebaiknya tutup seluruh aktivitas pertambangan galian C," kata Sadra saat menghadiri lokakarya di Amlapura, belum lama ini. Sebelumnya diberitakan, seluruh usaha galian C di Desa Sebudi Kecamatan Selat, Karangasem, saat ini tak lagi mengatongi izin. Izin galian C, hanya dikeluarkan KPPT Karangasem untuk wilayah Bebandem sebanyak dua izin dan Kecamatan Kubu 34 izin. Namun, meski sudah



Bali Post/gik

BEROPERASI - Puluhan alat berat masih beroperasi di lokasi galian C Desa Sebudi. Meski tidak ada izin, tidak ada instansi yang berani menertibkan.

tergolong ilegal, puluhan titik lokasi galian C masih beroperasi mengeruk kaki Gunung Agung hingga kini. Ironisnya, tidak ada satu pun lembaga terkait yang berani melakukan upaya penertiban.

Terhadap persoalan ini, Kasat Pol. PP Karangasem, Iwan Suparta, berkilah belum mengetahui informasi masih beroperasinya pusat

galian C di Desa Sebudi. Ia baru mau mengecek kembali lokasi galian di Desa Sebudi, sebelum mengambil langkah-langkah berikutnya sebagaimana diatur dalam perda. "Kami akan cek dulu ke lokasi. Kalau memang demikian (masih beroperasi tanpa izin) tentu kami akan ambil tindakan tegas," kata Iwan. (kmb31)